

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELIMPAHAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KECAMATAN BAHOROK KABUPATEN LANGKAT

ABSTRAK

Dalam perjalanan waktu serta seiring dengan perubahan di bidang politik pemerintahan, wewenang dan peranan *district* dikurangi dan sebagian diserahkan kepada *onder district*, kecamatan pengganti nama dari *onder district*, ditetapkan sebagai wilayah administratif yang menjalankan asas dekonsentrasi. Sedangkan *district* atau kawedanan mengalami likuidasi ataupun akhirnya mengalami metamorfosis dalam hal kedudukan dan wewenangnya dalam bentuk lembaga pembantu bupati atau walikota.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui: Studi Kepustakaan, Studi Dokumentasi, dan Studi Lapangan (*Field Study*). Teknis analisis data yang dilakukan yaitu data dikumpulkan, maka selanjutnya data akan dipadukan, digambarkan dalam bentuk uraian kalimat dengan memberikan interpretasi/penafsiran berdasarkan hasil wawancara langsung yang dilakukan oleh peneliti dengan sampel dari objek penelitian yang ada.

Bahwa pengaturan pendelegasian/pelimpahan kewenangan bupati kepada camat berpedoman kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan, secara umum, dan dilihat menurut Peraturan Bupati Langkat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat, dalam pelaksanaan dan tanggungjawab harus sesuai aturan hukum yang berlaku.

Bahwa pelaksanaan pendelegasian/pelimpahan kewenangan dari Bupati Langkat kepada Camat Bahorok, terlaksana sebagaimana mestinya, sesuai dengan porsi tentang perizinan dan non-perizinan. Alangkah baiknya pelaksanaan pendelegasian/pelimpahan kewenangan dari Bupati Langkat kepada Camat Bahorok, dengan porsi tentang perizinan dan non-perizinan. Dapat di sosialisasikan kepada masyarakat luas, agar masyarakat luas didorong untuk memperoleh izin mendirikan bangunan dan bagi pemerintahan daerah menambah pendapatan daerah.

Kata Kunci: Pelimpahan Kewenangan, Urusan Pemda, Kecamatan Bahorok

LEGAL REVIEW OF THE DELEGATION OF AUTHORITY OF THE REGENT TO CAMAT IN ORGANIZING THE AFFAIRS OF LOCAL GOVERNMENT IN BAHOROK DISTRICT OF LANGKAT DISTRICT

ABSTRACT

In the course of time and along with changes in the political field of government, the authority and role of the district was reduced and partly handed over to the onder district, sub-district renaming the onder district, was designated as an administrative region that carries out the principle of deconcentration. Where's the district or area experienced liquidation or eventually experienced a metamorphosis in terms of its position and authority in the form of an institution of Assistant Regent or Mayor.

Data collection methods used in this research were carried out through: Literature Study, Documentation Study, and Field Study. The data analysis technique is data collection, then the data will be combined, described in the form of sentence descriptions by providing interpretations/interpretations based on the results of direct interviews conducted by researchers with samples of existing research objects.

That the arrangement of delegation/delegation of regent's authority to the district head is guided by Government Regulation (PP) Number 17 of 2018 concerning Subdistricts in lieu of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 19 of 2008 concerning Subdistricts, in general, and seen according to Langkat District Regulations Number 8 of 2016 concerning Delegation Part of the Regent's Authority To the Head of District, in implementation and responsibility must be in accordance with applicable law.

That the implementation of the delegation/delegation of authority from the Langkat Regent to the Bahorok District Head was carried out accordingly, in accordance with the portion of licensing and non-licensing. It would be nice to carry out the delegation/delegation of authority from the Regent of Langkat to the Bahorok District Head, with a portion of licensing and non-licensing. Can be disseminated to the wider community, so that the wider community is encouraged to obtain building permits, and for regional governments to increase regional income.

Keywords: Delegation of authority, Government Affairs, Bahorok District